

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu dihadapi oleh masyarakat di tiap periode dimana peristiwa tersebut merupakan suatu kondisi yang memerlukan sikap kritis dari para kontestan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada khususnya dan masyarakat Yogyakarta sebagai pemilih dari para kontestan pada khususnya. Sikap kritis masyarakat tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh salah satu terpenting yakni faktor budaya dimana suatu agama dan kepercayaan merupakan faktor penentu yang mendukung alasan untuk memilih para calon pemimpin daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan penduduk muslim atau masyarakat beragama Islam yang merupakan agama mayoritas hingga saat ini sehingga pengaruh dari prinsip hidup keislaman adalah hal terpenting yang tidak bisa dihindari sebagai pertimbangan dalam memilih calon pemimpin daerah. Hal tersebut berarti bahwa kaidah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup umat Islam akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa calon kepala daerah di Kota Yogyakarta yang sesuai dan menunjang kehidupan yang menjunjung tinggi budaya keislaman masyarakat pada waktu akan datang.

Hal ini terkait dengan beberapa program yang diusung oleh para kontestan pada saat melakukan kampanye dimana program-program tersebut akan menarik perhatian masyarakat pemilih dimana mereka akan mengamati peran dari para kontestan tersebut pada waktu akan datang jika terpilih. Peran para kontestan tersebut juga telah diprediksi oleh masyarakat apakah akan menjamin semua aspek kehidupan atau tidak. Di satu sisi, peran para kontestan dalam

menjunjung tinggi budaya Islam masih dijadikan unsur pemikiran utama bagi masyarakat mengingat mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam sehingga semua kebijakan para kontestan Pemilihan Kepala Daerah tersebut diharapkan masih tetap mendasarkan pada nilai-nilai Islam.

Peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang atau sekumpulan orang terhadap orang lain berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem dimana tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar kondisi social yang bersifat stabil (Kozier, 2008). Hal ini berarti bahwa peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta sebagai sekumpulan individu sosial tertentu yang mengharapkan para calon pemimpin daerah untuk dapat mewakili seluruh aspirasi mereka dalam menghadapi semua unsur kehidupan ke depan.

Peran juga dideskripsikan sebagai sebuah makna yang dikaitkan dengan orang lain atau pada suatu komunitas sosial dan politik tertentu sehubungan dengan kombinasi antara posisi dan pengaruh (Sutarmadji, 2013). Berdasarkan pernyataan Sutarmadji tersebut, masyarakat Kota Yogyakarta yang merupakan komunitas sosial telah memahami tentang perilaku para elit politik dalam unsur politik sebagai suatu kombinasi antara posisinya dalam pemerintahan serta pengaruhnya dalam menentukan kebijakan untuk publik.

Peran menurut Soekanto (2009) juga diartikan sebagai bentuk perilaku yang meliputi tiga hal yakni perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat dimana terdapat beberapa peraturan yang membimbing seseorang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hal berikutnya yang dikaitkan dengan peran adalah suatu konsep mengenai apa yang akan dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat sebagai sebuah organisasi serta perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Soekanto tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh calon pemimpin daerah Kota Yogyakarta selalu terkait dengan norma atau peraturan yang akan menentukan kebijakannya dalam mengatur kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai struktur sosial masyarakat terkait dengan posisinya di lembaga pemerintahan Kota Yogyakarta.

Sedangkan menurut Raho (2007), peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang dengan kedudukan status tertentu yang bersifat dinamis berupa suatu tindakan atau perilaku yang dilaksanakan dalam situasi sosial. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sebagai obyek situasi sosial akan mengharapkan pola tingkah laku dari para calon Kepala Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan statusnya dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat dinamis bagi kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta.

Peran dari para calon Kepala Daerah di Kota Yogyakarta tersebut akan terwujud melalui kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta yang sekaligus merupakan suatu perjalanan sejarah baru bagi dinamika kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Para calon Kepala Daerah Kota Yogyakarta tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat Kota Yogyakarta serta tetap mendasarkan moral dan pertanggungjawaban yang konstituen bagi masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah menurut Sumarno (2005) merupakan suatu pesta demokrasi rakyat yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik serta berasal dari organisasi masyarakat yang berdiri secara independen dan memenuhi persyaratan.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta terselenggara dengan mengajukan para calon Kepala Daerah yang berasal dari partai politik atau

gabungan partai politik serta dari organisasi masyarakat sehingga diharapkan para calon Kepala Daerah tersebut dapat mewakili aspirasi dari partai politik atau organisasi masyarakat tersebut. Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta merujuk pada landasan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, masyarakat Kota Yogyakarta pernah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah untuk posisi atau jabatan walikota dimana walikota merupakan salah satu posisi dalam struktur pemerintahan sebagai organ atau alat untuk menjalankan pemerintahan (Ridwan HR, 2002). Merujuk pada pernyataan Ridwan HR tersebut, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk posisi walikota Kota Yogyakarta adalah suatu upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengatur situasi sosial Kota Yogyakarta yang mendasarkan norma atau aturan masyarakat maupun dasar hukum tertinggi di Indonesia yang merupakan kedaulatan rakyat sebagai syarat utama dalam Pemilihan Kepala Daerah yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Ayat 4 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Sedangkan menurut Sunarno (2008), walikota merupakan pemerintah yang mengatur pemerintahan suatu daerah sesuai dengan amanat Pasal 18, Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Pemilihan Kepala Daerah untuk jabatan walikota di Kota Yogyakarta merupakan upaya dalam pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melahirkan seorang pemimpin bagi masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 18, Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dimana walikota tersebut diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tertentu untuk menata kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 diketahui juga melibatkan peran dari organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam yakni Muhammadiyah dimana Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia yang memiliki gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar yang berazaskan Islam serta bersumber pada Al-Quran dan Assunnah. Meskipun pada era reformasi Muhammadiyah tidak berafiliasi pada partai politik manapun namun menjelang kontestasi pemilu baik itu pemilu legislatif PEMILU Presiden ataupun PILKADA, Muhammadiyah tetap mendukung politik kebangsaan yang mengutamakan pendidikan politik berbasis moral. Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir menegaskan bahwa kadernya harus pandai dalam menempatkan diri sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan yang tidak terlibat dalam politik praktis (Haedar Nasir “*Memahami Ideologi Muhammadiyah*“, 2010).

Muhammadiyah lahir pada tahun 1912 di Yogyakarta dimana pendirinya adalah seorang imam masjid gede yang bernama KH Ahmad Dahlan. Dalam kiprahnya Muhammadiyah yang telah berumur 1 abad lebih, secara struktur organisasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah telah berkembang di seluruh Indonesia yang diimbangi dengan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Pada perkembangannya, Muhammadiyah juga melahirkan organisasi di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah yang dinamakan organisasi otonom untuk mewadahi perempuan, pemuda, pelajar, perempuan muda, mahasiswa, kependuan dan pendidikan beladiri dengan struktur organisasi yang begitu besar sehingga Muhammadiyah mempunyai basis masa yang cukup diperhitungkan.

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah sering menghadapi perubahan zaman baik itu bersifat sosial politik maupun perubahan yang terjadi di masyarakat bawah dan perubahan budaya. Dalam hal politik, Muhammadiyah mempunyai dinamika yang unik sesuai dengan kebutuhannya. Muhammadiyah mempunyai pokok-pokok pemikiran dan gagasan sendiri terkait perpolitikan

terhadap bangsa dan negara dimana pemikiran kebangsaan ini mengatur sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap perkembangan dan dinamika perpolitikan di Indonesia.

Perubahan sikap dan pandangan Muhammadiyah terhadap perpolitikan Indonesia diatur melalui pokok pemikiran yang bersifat strategis berupa khittah. Khittah Muhammadiyah mengatur bagaimana cara pandang Muhammadiyah dalam berbagai sifat strategis termasuk politik dari tahun ke tahun sejak berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki perbedaan pandang terkait dengan keterlibatan Muhammadiyah terhadap politik praktis di Indonesia. Muhammadiyah diawal kemerdekaan terlibat langsung terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Muhammadiyah sebagai salah satu pendiri Partai Masyumi bersama dengan salah satu organisasi masyarakat yang berbasis agama yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan organisasi Islam lainnya. Bersama organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam, Partai Masyumi berkembang dan menjadi alat dakwah bagi umat Islam dan menjadi kendaraan umat Islam dalam mewujudkan kepentingan umat Islam.

Pokok-pokok pikiran dan gagasan Muhammadiyah berubah terhadap kehidupan politik ketika Muhammadiyah mengundurkan diri dari keanggotaan istimewa Partai Masyumi yang sebelumnya Nahdatul Ulama (NU) terlebih dahulu meninggalkan Partai Masyumi dengan alasan kepentingan mereka kurang diakomodir oleh Partai Masyumi. Keluarnya Muhammadiyah dari anggota Masyumi tidak lain adalah karena pertimbangan internal Muhammadiyah sendiri yang menganggap bahwa urusan organisasi lebih penting daripada keterlibatan langsung membangun Negara.

Namun pemikiran politik kebangsaan dari organisasi Muhammadiyah terus berubah sesuai dengan perubahan sosial politik di Indonesia namun belum mendasar dan hanya bersifat memperbarui sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga Muhammadiyah terlibat aktif terhadap

pelaksanaan pembangunan nasional yang salah satunya adalah pembangunan masyarakat melalui keterlibatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Hambali, *“Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah”* 2010).

Peran Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebagaimana yang dilansir oleh SindoNews.com oleh Restu Hanafi pada tanggal 27 April 2016, pukul 06.09 WIB dimana Wakil Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Ashad Kusuma Jaya yang menyatakan bahwa Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta tetap memberi dukungan sejumlah bakal calon Kepala Daerah pada PILKADA Kota Yogyakarta 2017. Kepengurusan Muhammadiyah juga telah mengambil sikap agar warga Muhammadiyah hanya memilih bakal calon yang berkultur Muhammadiyah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah daerah yakni mendorong kader Muhammadiyah agar terlibat dalam aktivitas politik khususnya menjelang Pilkada 2017 yang berarti bahwa warga Muhammadiyah harus memakai hak pilih serta hak dipilih sesuai aturan perundangan dan berkultur Muhammadiyah serta memiliki jiwa reformis. Terdapat sekitar 25 ribu warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hasil musyawarah daerah tersebut dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta juga telah mengenalkan nama-nama yang direkomendasikan untuk bisa dipilih.

Peran Muhammadiyah dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebagaimana yang dilansir oleh Tempo.co oleh Admin pada tanggal 21 april 2016, pukul 18.29 WIB dimana menurut Romy Harianto selaku bakal calon independen walikota Kota Yogyakarta menyatakan bahwa akan menghadapi persaingan yang ketat dengan bakal calon dari Partai Amanat Nasional untuk memperebutkan dukungan dari organisasi Muhammadiyah yang keberadaannya mengakar kuat di Yogyakarta. Rommy Harianto sendiri merupakan kader aktif dari

Muhammadiyah di tingkat provinsi sehingga mampu meraup suara dengan melibatkan kader dan warga Muhammadiyah untuk mendukungnya di PILKADA Walikota Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan dari media SindoNews.com dan Tempo.co tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang berbasis Islam diketahui telah melibatkan diri secara aktif terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang salah satunya adalah pembangunan masyarakat melalui keterlibatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Yogyakarta.

Hal ini bertentangan dengan salah satu khittah perjuangan Muhammadiyah sebagai acuan gerakan dalam mewujudkan "*Baladatul Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*" yakni Muhammadiyah tidak berafiliasi serta tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan yang berhaluan politik dan hanya mengembangkan sikap positifnya dengan melakukan fungsi kritik sesuai dengan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam menegakkan sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban dan Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing sesuai kepentingan Muhammadiyah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki opini bahwa organisasi masyarakat Muhammadiyah belum sepenuhnya menjalankan khittah perjuangannya yakni dengan melibatkan organisasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat Kota Yogyakarta dengan menghadirkan anggotanya sebagai calon bakal walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota Yogyakarta. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang berbasis agama Islam dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017 karena berdasarkan Ijtihad Ulama, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam wajib untuk tidak melibatkan diri di dalam politik praktis. Walau

Muhammadiyah menyadari bahwa politik menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka gerak dan langkahnya tidak akan bisa lepas dari kehidupan politik. Namun berdasarkan khittah, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam harus mengambil bagian dalam perjuangan politik secara umum, yakni membangun masyarakat dan peduli atas kebijakan-kebijakan strategis negara.

Ketertarikan penulis terhadap peran Muhammadiyah dalam kepemiluan tidak lepas dari beberapa sikap pimpinan yang dianggap tidak sesuai dengan khittah kebangsaan yang dimiliki Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah lebih menarik diteliti karena Muhammadiyah sendiri dalam memandang dengan politik praktis akan mengganggu gerakan dakwah *amar makruf nahi mungkar* karena politik praktis ditakutkan dapat mengganggu kemurnian dalam berdakwah. Dalam konteks pemilu walikota Yogyakarta Muhammadiyah mempunyai sejarah panjang di Yogyakarta mengingat kota Yogyakarta adalah kota kelahiran Muhammadiyah, tentunya dengan status bahwa Yogyakarta adalah rumah dengan banyaknya anggota Muhammadiyah di Yogyakarta tentunya Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat besar dalam hal pembangunan di Yogyakarta ditambah lagi banyak kader Muhammadiyah yang mempunyai kapasitas lebih dalam memimpin.

Muhammadiyah di Yogyakarta mempunyai historis yang berbeda dengan Muhammadiyah daerah lain. Muhammadiyah di Yogyakarta mempunyai semangat sendiri dalam mengawal dan berkontribusi dalam perkembangan kota Yogyakarta. Kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan kota Yogyakarta tidak perlu diragukan lagi. Dengan jumlah amal usaha yang ada di Yogyakarta ditambah dengan anggota yang banyak tentunya sangat menarik beberapa kontestan calon walikota yang sedang bertarung dalam pilwakot kota Yogyakarta tahun 2017. Berbeda

dengan organisasi masyarakat yang berbasis keislaman lainnya Muhammadiyah sangat menarik di bandingkan dengan Nahdlatul Ulama dan lainnya baik itu dilihat dari sejarah maupun basis massa.

Pandangan Muhammadiyah terhadap politik praktis dengan kenyataan bahwa Muhammadiyah mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa sangatlah menarik untuk diteliti mengingat seluruh kebijakan publik yang dilakukan pemerintah tidak lepas dari proses politik. Penelitian ini juga menegaskan peran apa saja yang dilakukan Muhammadiyah dalam proses pemilihan Walikota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah “***Bagaimana peran organisasi masyarakat Muhammadiyah yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) Tahun 2017 (Studi Kasus: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta***” ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran organisasi masyarakat Muhammadiyah yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang peran organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) Tahun 2017 (Studi Kasus: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta memiliki manfaat yakni:

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kasanah bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta dalam memberikan peran yang positif dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) terkait dengan program-program yang menunjang unsur keagamaan.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan peran organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017 dengan studi kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.

3. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan bagi peneliti untuk lebih memperdalam peran organisasi masyarakat berbasis keagamaan yakni Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017 dengan studi kasus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti tentang peran organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) dengan mengangkat studi kasus pada organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan selain institusi Muhammadiyah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang diciptakan oleh peneliti dalam mewujudkan fungsinya untuk mengobservasi atau melihat suatu fenomena atau kejadian yang dilakukan secara sistematis melalui spesifikasi suatu hubungan antar variabel sehingga dapat digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut (Sugiyono, 2009). Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Gerakan Sosial Islam

a. Sejarah Gerakan Sosial Islam

Kemunculan gerakan sosial Islam menifestasi dari visi dan misi dalam rangka melibatkan diri secara aktif pada aspek kemanusiaan untuk mentransformasi kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkualitas, beradab serta merefleksikan nilai-nilai ajaran Islam. Gerakan sosial Islam memiliki sejarah yang panjang di belahan dunia terkait dengan penyikapan keterpurukan umat Islam seperti runtuhnya khilafah Turki Usmani, kemunculan Hizbutahrir di Palestina, gerakan sosial di Pakistan dimana peristiwa tersebut merupakan respon publik yang berkaitan dengan politik di dunia (Singh, 2002).

Gerakan sosial Islam pertama kali muncul di belahan benua Asia dan Afrika dalam rangkaian transmisi ideologi revivalisme Islam, modernisasi Islam yang kemudian diikuti dengan menguatnya ideologi Wahabbisme dan Salafisme. Gerakan sosial Islam memiliki tujuan untuk mereformasi sistem sosial dan politik agar sesuai dengan nilai-nilai etik Islam sehingga gerakan sosial Islam harus bersinergi dengan upaya peningkatan jumlah kaum terpelajar di kalangan Muslim khususnya negara-negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam seperti halnya di Indonesia. Munculnya gerakan sosial Islam diawali abad-20 di

Nusantara sebagai konsekuensi logis karena meningkatnya jumlah kaum terpelajar, munculnya sarakat dagang Islam pada tahun 1905 sebagai emberio Gerakan sosial islam yang disusul dengan berdirinya Sarekat Islam pad tahun 1912 serta Muhammadiyah 1912 yang merupakan respon atas kondisi internal umat islam yang nyaris kritis karena ada penetrasi pihak luar melalui kolonialisme serta imperialisme Barat. Lebih dari satu dekade kemudian, berdiri persatuan islam (Persis) pada 1923 dibandung dan Nhadatul Ulama (NU) pada tahun 1926 juga didirikan di Surabaya.

Kemunculan gerakan islam di Indonesia di tandai oleh dua konsisi yang saling berinteraksi yakni masalah-masalah sosial keagamaan umat islam dan kondisi sosial politik kebangsaan . kita bisa memetakan kemunculan gerakan sosial islam pra kemerdekaan , ketiak serekat islam, muhammadiyah, persatuan islam dan nahdatul ulama muncul, gerakan sosial menghadapi dua masalah utama yakni kebijakan politik pemerintah yang diskriminatif serta kondisi sosial ekonomi umat islam yang terpuruk. Ketika muhammadiyah lahir tahun 1912, prakter keberagamaan umat islam tidak murni lagi, banyak hal yang kegiatan agama dincampur adukan dengan ritual mistis. Pemikiran umat islam terbelenggu oleh madzhab dan taqlib kepada ulam sehingga ijtihad tidak berfungsi untuk mendorong transformsi sosial.

Gerakan islam melakukan gerakan dengan menekankan pada identitas keagamaan dan orientasi pada hal-hal yang bersifat teologis, walaupun dalam perkembanganya strategi tersebut dipandang berhasil membangun dasar kesedadran sosisal jamaah, tetapi untuk bebrapa kasus gerakan islam seringkali

gagal dalam beradaptasi dengan struktur politik. Muhammadiyah, NU, DDII dan beberapa gerakan sosial lainnya mempergunakan framing gerakan dengan orientasi pada pembinaan dan pencerahan jamaahnya, tetapi pada periode politik tertentu gerakan islam sulit memainkan peran yang maksimal (Mulkan, 1994).

Kemunculan gerakan sosial islam dianggap sebagai kebangkitan kelompok pesantren yang mengadaptasi konsep-konsep islam yang bersifat eksklusif dengan pemikiran modern serta bersifat rasional dan fungsional munculnya gerakan sosial islam tersebut dapat dipahami bahwa gerakan social mengalami eskalasi dalam situasi politik yang tidak stabil seperti distorsi identitas, krisis social dan krisis politik yang mengakibatkan konflik dalam suatu negara sebagai akibat dari pemberontakan dan gerakan teror bersamaan dalam situasi yang berubah. Disatu sisi kekuatan eksternal suatu negara juga ikut menentukan arah gerakan baik faktor ideologi, jaring sumberdana serta kontribusi pihak luar seperti pada kasus krisis Indonesia pada tahun 1998. Pasca krisis Indonesia pada tahun 1998, muncul sejumlah gerakan sosial islam yang memanfaatkan peluang politik yang dibuka oleh kapitalisme Barat.

b. Prespektif Gerakan Sosial Islam

Gerakan sosial islam merupakan obyek kajian studi ilmu-ilmu sosial yang actual dan menarik dalam beberapa tahun terakhir dengan corak yang beragam sehingga menumbukan prespektif melalui lintas disiplin keilmuan. gerakan sosial islam merupakan obyek kajian yang dapat dianalisis melalui studi sosial, pendekatan politik, sejarah dan prespektif ekonomi serta politik (Jurdi, 2013).

Gerakan sosial islam pada mulanya memfokuskan perhatian pada pemurnian agama (purifikasi) yang berkembang menjadi sebuah ideology untuk merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga diperlukan upaya aksi sosial yang menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap system yang dihasilkan dari interaksi dengan modernitas sehingga mendorong sejumlah gerakan sosial islam untuk serta memperjuangkan system islam sebagai solusi untuk mengatasi persoalan kemanusiaan (jurdi, 2013).

Permasalahan kemanusiaan tersebut tidak lepas dari prespekti kultural politik sehingga gerakan sosial keagamaan islam menggunakan strategi kultural dalam rangka menghilangkan kesan adanya keterkaitan dengan politik praktis. Kendati usaha menghilangkan kesan tersebut sebagian berhasil, namun tindakan sosial menggunakan stategi kultural tetap steril dari motif motif politik karena strategi tersebut bertujuan untuk menyebarkan, mencerahkan serta memberdayakan masyarakat yang kehidupannya tetap dipengaruhi oleh motif politik.

Gerakan sosial islam dengan menggunakan strategi kultural merupakan pilihan gerakan tanpa bermaksud mengosongkan sama sekali ruang kesadaran umat dari politik sehingga kesadaran poltik tetap ada dan dikembangkan namun tidak terpusat dalam terpusat dalam politik praktis yang bersifat temporer sehingga memungkinkan adanya politik praktis yang bersifat jangka panjang. Gsi memiliki tujuan dalam menangkap berbagai peluang dan saran bagi keberhasilan perjuangan umat Islam antara lain melalui bidang dakwah, pendidikan, sosial-ekonomi, budaya dan sebagainya. Gerakan sosial keagamaan di Indonesia bersifat penetrative dan inklusif sehingga tidak terbatas dalam bidang politik maupun kekuasaan

sehingga memberi makna islam kepada budaya dalam arti luas seperti politik alokatif yang diajalkan dalam rangka mengajak manusia atau umat pada kebenaran serta meninggalkan kemungkaran (jurdi, 2013).

c. Kategorisasi Gerakan sosial islam

Keragaman bentuk respon pada gerakan sosial islam pada level wacana umat islam menghasilkan perubahan iklim politik dalam rangka menjawab berbagai persoalan umat di masadepan yang dikelompokan sebagai berikut;

- 1) Kelompok islam tradisionalis yang menekan pada tradisi islam klasik sehingga mencampurkan tradisi masyarakat yang tidak mendasarkan pada alquran dan assunah. Hal ini mengakibatkan kerancuan presepsi yakni islam yang tidak bertentangan dengan budaya local masyarakat serta tidak semua budaya local sesuai dengan ajaran islam sehingga gerakan sosial islam perlu melakukan dekonstruksi tata kehidupan sosial secara menyeluruh yang masih dalam bingkai tradisi islam (Jurdi, 2013).
- 2) Kelompok islam modernis yang memahami ajaran islam secara actual, rasional serta mengadopsi model pendidikan moder barat yang menekankan kembalinya islam yang otentik sehingga memiliki kemurnian seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW (Jurdi, 2013). Kelompok ini memiliki kelompok pendukumh terbanyak dari kaum terpelajar dna komunitas perkotaan.

- 3) Kelompok islam puritan yang menekankan ekspresi estetis atau keindahan islam yang keluar dari tradisi dogmatis islam yang menekankan pada teks klasik islam (Jurdi, 2013)
- 4) Kelompok islam kiri yang memadukan sisi sosialisme serta marxisme kedalam makna islam kelompok ini menekankan pada telaah kritik system sosial, hermeneutika teks dan tafsir sosial kontemporer sehingga islam menjadi kekuatan pembebas dan revolusioner (Jurdi, 2013).

Gerakan sosial islam memiliki kaitan munculnya gerakan islam muhammadiyah dimana gerakan sosial islam memiliki tujuan khusus yakni memberdayakan serta menata kehidupan umat islam dalam rangka menjawab persoalan dimasa depan dengan mengadopsi sebagian kultur barat namun tetap meniadakan islam sebagai pedoman kehidupan yang utama. Tujuan ini merupakan deskripsi atau kajian menyeluruh dari gerakan sosial islam.

2. Muhammadiyah

a. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah berdiri pada saat dunia Islam mengalami kekuasaan imperium Turki Usmani yang memudar, wahabi mulai berkuasa di semenanjung Arab, kolonialisme mencengkram Hindia-Belanda, umat Islam pendidikannya menjadi rendah, miskin, dan dan penyakitan. Pada saat kondisi seperti itu munculah priyayi jawa dan pedagang kaum yang menyadari posisi sosial pemeluk Islam sebagai bagian dari ibadah dan amal shaleh. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti yang

digambarkan di atas, Ahmad Dahlan muncul sebagai seorang yang peduli terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat pribumi secara umum atau masyarakat muslim secara khusus.

Ahmad Dahlan lahir dari kampung kauman Yogyakarta tahun 1968 dengan nama kecilnya Muhammad Darwis. Ayahnya K. H. Abu Bakar, adalah Imam dan Khatib Masjid besar kauman Yogyakarta, sementara ibunya aminah adalah anak K. H. Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Dengan pola pemikirannya yang cemerlang Ahmad Dahlan mulai membentuk sebuah organisasi yang bermula dari pendirian sekolah yang perlu adanya sebuah organisasi untuk mengelola sekolah tersebut. Di samping kondisi mikro pada saat itu yang telah menimbulkan kesadaran arti pentingnya sebuah organisasi modern sehingga sekolah yang didirikan dapat terus berlangsung (Syarifuffin Jurdi, 2010).

Setelah mengalami pertemuan dan pembicaraan yang sangat panjang maka dirumuskan sebuah anggaran dasar organisasi yang dirumuskan dalam bahasa belanda dan bahasa melayu yang dalam penyusunannya dibantu oleh R. Sosrosugono seorang guru bahasa Melayu di Kweekschool Jetis. Organisasi yang dibentuknya diberi nama Muhammadiyah, nama yang berhubungan dengan nama nabi terakhir Muhammad SAW. Atas itulah diharapkan anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman (Jurdi,2010).

b. Faktor-faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Berdirinya Muhammadiyah

Apabila ditinjau dari faktor penyebab yang melatarbelakangi berdirinya persyarikatan Muhammadiyah, maka dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu sebagai berikut:

i. Faktor Subyektif

Faktor subyektif yang sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap al-Qur'an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi al-Qur'an. Ia melakukan penelaan terhadap terhadap ayat al-Quran dengan teliti dan melihat sebab turunnya ayat (asbab al-Nurul).

Sikap KH. Ahmad Dahlan seperti itu karena melaksanakan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 82 dan Muhammad ayat 24 yang di dalamnya berisi tentang taddabur terhadap ayat al-Qur'an. Hal itu kemudian KH. Ahmad Dahlan memperaktekan dengan melakukan penelaan terhadap surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi : “ *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* ” (QS. Ali Imran 3: 104).

Setelah pengkajian, penelaan dan pendalaman terhadap ayat tersebut, KH. Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membuat sebuah

perkumpulan, organisasi atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah Islam, amar ma'ruf nah munkar di tengah-tengah masyarakat luas (Pasha dan Darban, 2010).

ii. Faktor Obyektif

Beberapa faktor obyektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang sebagian dikelompokan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, dan sebagian dimasuk dalam faktor-faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Adapun faktor-faktor obyektif yang bersifat internal adalah ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai satusatunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Faktor obyektif selanjutnya adalah lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku "Khalifah Allah di atas bumi". Sedangkan faktor obyektif yang bersifat eksternal adalah semakin meningkatnya gerakan Kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi Bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia dan pengaruh dari gerakan pembaharuan di dunia Islam (Pasha dan Darban, 2010).

Selain dua faktor tersebut, ditemukan empat teori yang dikemukakan oleh Alwi Shihab mengenai latar belakang lahirnya Muhammadiyah yang menguatkan dua faktor tersebut yaitu teori faktor gagasan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Menurut teori

ini, selama paruh akhir abad ke-19, gagasan pembaharuan Islam yang tengah berkembang di beberapa Timur Tengah mulai diperkenalkan di Indonesia baik secara langsung oleh para jamaah haji yang menyampaikan kepada mereka secara lisan maupun secara tidak langsung melalui berbagai penerbitan buku dan jurnal yang tersebar di kalangan kaum Muslim santri di Indonesia.

Pada pergantian abad, gagasan pembaharuan yang dikembangkan oleh Jamal alDin al-Afghani (w. 1897), Syaikh Muhammad Abduh (w. 1905), dan penerusnya, Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935) mulai mendapat tempat di Indonesia. Selanjutnya adalah teori faktor pembaharuan Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani tumbuh di Timur Tengah pada akhir abad ke-19, merupakan kelanjutan logis gerakan awal pembaharuan Wahabiyah. Dari dua tokoh pembaharuan tersebut sebagian kalangan meyakini bahwa gagasan pembaharuan Muhammad Abduh lebih besar dan bertahan lama pengaruhnya terhadap lahir dan berkembangnya Muhammadiyah. Keduanya menggalakan gagasan dibukanya pintu ijtihad dan mengecam taqlid. Ditambah lagi keduanya sama-sama menjadikan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah sebagai sumber utama rujukan mereka.

Teori faktor pertentangan internal dalam masyarakat Jawa juga dinyatakan oleh Alwi Sihap dalam mendukung faktor subyektif dan obyektif. Dalam teori ini dikemukakan, kelahiran Muhammadiyah tidak lebih dari suatu akibat adanya proses pertentangan yang panjang dan berlangsung perlahan antara dua kelompok besar dalam masyarakat Jawa, yakni kaum priayi di satu pihak dan kaum santri di pihak lain. kaum priayi adalah kelompok Muslim yang dangkal tingkat keislamannya, sedangkan kaum

santri adalah kelompok Muslim yang sangat taat dan tinggi komitmen dalam keislamannya.

Selanjutnya adalah teori faktor penetrasi Kristen. Teori ini menyebutkan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah menawarkan diri sebagai organisasi yang mempertahankan diri dari pengaruh Kristenisasi (Hidayatullah, 2010).

c. Kepribadian Muhammadiyah

Pada hakekatnya kepribadian Muhammadiyah merupakan sebuah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Adapun fungsi Kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Secara normative, kepribadian Muhammadiyah terkait dengan politik yang sudah diatur secara jelas dan terang benderang dalam dokumen-dokumen resmi organisasi. Pandangan Muhammadiyah terhadap politik kadang kadang sangat positif dan optimis. Berdasarkan dokumen-dokumen resmi organisasi. Muhammadiyah memiliki pandangan yaitu bagaimana mestinya warga Muhammadiyah menjalankan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, juga ada penegasan yang sangat mengesankan tentang politik. Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud

bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali, 2010).

Partai politik itu, sebagaimana juga kekuasaan negara, sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam nonpolitik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara dimana wawasan keagamaannya justru harus menyatu dengan wawasan kekuasaan.

Muhammadiyah tampaknya tidak mampu menghindar untuk terlibat dalam politik. Ternyata, kadang-kadang, Muhammadiyah benar-benar bermain politik secara langsung dan terbuka. Muhammadiyah berbeda sikap dengan yang dinyatakan dengan karakter nyatanya yang nonpolitik sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas dalam pandangan yakni Muhammadiyah memainkan tiga peranan yang saling terkait yaitu :

- i. Sebagai reformis keagamaan (antara lain melakukan gerakan memurnikan agama Islam dengan antara lain memberantas takhayul, bid'ah, dan khurafat, alias TBC).
- ii. Sebagai pelaku perubahan sosial (bertujuan memodernisasi umat Muslim Indonesia agar terangkat dari ketertinggalannya mencapai tempat terhormat di dunia modern.
- iii. Sebagai kekuatan politik. (PP Muhammadiyah Majelis Tabligh, 1998).

d. Ijtihad Politik Muhammadiyah

Gerakan Muhammadiyah yang dimulai dari Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh KHA Dahlan, memiliki dua sisi. Di mana masing-masing sisi saling menguatkan. Satu sisi Muhammadiyah adalah merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam (tajridu al Islamiyah), di sisi yang lain juga merupakan gerakan pembaharuan peradaban (tajdidu al Hadharah). Setiap persoalan yang timbul dalam pembaruan peradaban dilakukan pembobotan persoalan (tarjih al masail). Relasi Tajdid-Tajrid-Tarjih ini bisa disebut "Dialektika Muhammadiyah".

Oleh karena itu, orang Muhammadiyah di dalam pikirannya selalu digairahkan untuk menemukan hal-hal yang baru, namun selalu waspada dan mempersoalkan segala kebaruan yang hadir untuk dibobot (ditarjih) dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang otentik. Dengan demikian perkembangan dan kemajuan peradaban akan tetap berada di jalan yang benar. Ketiga anasir ini (Tajdid-Tajrid-Tarjih) adalah merupakan landasan metodologis praktik Ijtihad di dalam Muhammadiyah (Yamin,2015).

Di dalam ijtihad, bagaimanapun Muhammadiyah dituntut selalu membuat langkah-langkah yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Begitu pula halnya Ijtihad dibidang politik. Sebagai perwujudan dari gerakan tajdid, Muhammadiyah selalu bangkit untuk membuat prestasi baru dan pencapaian baru dalam seluruh aspek, tidak kecuali dalam bidang politik.

Hingga saat ini ijtihad politik Muhammadiyah bisa dibilang lebih terfokus pada upaya menjaga jati diri Muhammadiyah, sekaligus cerminan dari kurang

memuaskannya --untuk tidak menyebut gagal-- hasil yang dicapai dalam berijtihad politik, bahkan terkadang hal itu menjadi sebuah pengalaman pahit. Muhammadiyah menyatakan tidak melibatkan diri di dalam politik praktis. Walau Muhammadiyah menyadari bahwa politik menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka gerak dan langkahnya tidak akan bisa lepas dari kehidupan politik.

Muhammadiyah, sejak fase pertama berdirinya memandang kehidupan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, walau Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam politik praktis secara langsung, kiprah politik harus tetap dilakukan Muhammadiyah dalam berbentuk yang lain, paling tidak berupa pemikiran yang dibutuhkan bangsa dan negara tanpa mengabaikan aksi gerakannya yang bersifat konkret. Sampai pertengahan tahun 1998, eksistensi Khittah Muhammadiyah memang masih dapat terjaga sesuai amanat Muktamar Ujung Pandang tahun 1971.

Walaupun perubahan konstelasi politik nasional yang ditandai dengan tumbangnyanya rezimnya Orde Baru telah membawa angin perubahan bagi wacana perpolitikan Muhammadiyah (Qodir, 2015).

Sebagai bagian dari kekuatan sosial di Indonesia, Muhammadiyah tidak mungkin membiarkan kemungkinan politik yang dapat dimainkan berlalu begitu saja. Tumbangnyanya rezim Orde Baru menghadirkan harapan politik baru yang kemudian ditandai dengan munculnya berbagai macam partai politik. Pada sidang tanwir tanggal 5-7 Juli di Semarang merekomendasikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Hasil dari rekomendasi tersebut

berdirilah Partai Amanat Nasional yang di deklarasikan pada hari ahad tanggal 23 Agustus 1998 di Senayan Jakarta, dengan branded ketokohan pada diri Prof. M. Amien Rais sebagai pelaku utama gerakan reformasi. Pada saat itulah pembaharuan politik yang lebih berperadaban diharapkan terjadi.

Pada masa ini, secara kelembagaan Muhammadiyah tidak memiliki hubungan apapun dengan partai politik. Namun dampak dari situasi politik ini bagi Muhammadiyah, juga terhadap ummat Islam umumnya adalah tiadanya ikatan emosional yang kuat dengan partai politik manapun. Realitas politik di era Orde Baru telah melahirkan sebuah ijhtihad politik baru yang kita kenal dengan high politics, dalam posisi ini Muhammadiyah lebih menekankan perjuangan politik melalui sumbangan konsep-konsep, baik itu konsep kenegaraan maupun ekonomi.

Gerakan high politics Muhammadiyah muncul dibawah pimpinan Amien Rais yang berstatus sebagai Ketua PP Muhammadiyah dengan melakukan menuver langsung ke area legitimasi kekuasaan Orde Baru. Dengan isu yang sangat sensitive pada masa itu, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Zuly Qodir, 2015).

Muhammadiyah di seluruh lingkungan Persyarikatan dalam menghadapi perkembangan situasi saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan dan kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah diminta untuk mengindahkan ideology Muhammadiyah.

Muhammadiyah berijtihad melalui Khittah, bahwa gerakan Islam ini mengambil bagian dalam perjuangan politik secara umum, yakni membangun masyarakat dan peduli atas kebijakan-kebijakan strategis negara. Inilah peran politik kebangsaan, yang disebut politik adiluhung atau high-politics. Peran politik

kebangsaan ini menyatu dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Namun berdasar Khittah pula, Muhammadiyah berjihad tidak mengambil peran dalam perjuangan politik praktis, yakni politik untuk meraih kedudukan dalam pemerintahan. Saluran politik praktis harus melalui partai politik, bukan melalui Muhammadiyah.

Muhammadiyah sejak dulu sampai kapanpun harus tetap berkhtiar sesuai prinsip, ideologi, dan kepribadiannya dalam berhadapan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk yang berkaitan dengan politik kekuasaan. Dalam hal ini dapat dilakukan empat langkah strategis sebagai aktualisasi Khittah sekaligus jalan keluar Muhammadiyah dalam menghadapi dunia politik praktis yakni:

- i. Menjalin komunikasi yang baik dengan kalangan partai politik dan lembaga-lembaga pemerintahan serta berbagai kekuatan bangsa lainnya dalam memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, umat, dan bangsa.
- ii. Menyiapkan secara terencana dan terorganisasi para kader politik untuk aktif dan masuk ke partai politik agar memperoleh saluran meraih jabatan dalam pemerintahan, apakah di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun institusi lainnya yang penting dan strategis. Langkah ini bisa dilakukan langsung oleh Pimpinan Persyarikatan maupun Unsur Pembantu Pimpinan atau badan khusus tergantung bagaimana efektifnya.
- iii. Menyiapkan para kader profesional yang dapat diproyeksikan ke berbagai struktur termasuk di pemerintahan. Keduanya dapat

dirancang-bangun oleh organisasi terutama melalui lembaga pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah, lebih khusus Perguruan Tinggi. Pada saat yang sama juga memerlukan motivasi dan kerja keras para kader Muhammadiyah sendiri sehingga dalam jangka panjang akan membuahkan hasil.

- iv. Mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang good govenance, objektif, dan berbasis meritokrasi. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota legislatif, pejabat yudikatif, dan pejabat pemerintahan di struktur dan institusi mana pun dari manapun asalnya harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara serta tidak terjebak pada konspirasi dan kepentingan sempit diri, keluarga, kroni, dan golongannya.

3. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik). Sedangkan menurut Miriam Budiardjo partai adalah sekelompok orang yang seasas, sehaluan terutama di bidang politik dan berdasarkan pendapat Carl J. Friedrick partai adalah alat perjuangan atas sebuah nilai yang mengikat kolektivitas organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa partai adalah suatu organisasi yang mempunyai visi dan misi membangun suatu pemerintahan dalam bidang politik.

Menurut pendapat Roger F. Soltau politik adalah kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menunjukkan bersama negara dan melaksanakan tujuan itu. Menurut Aristoteles politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki dan menurut Meriam Budhiarjo, pengertian politik adalah macam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat sehingga partai politik adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakatnya, salah satunya dengan meraih kekuasaan.

b. Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan suatu pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang bersangkutan.

Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik sehingga tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang.

Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik juga dijelaskan mempunyai tujuan umum yaitu:

- i. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
- iii. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- iv. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah:

- i. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- ii. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- iii. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Anggota Partai

Anggota partai merupakan sumber daya manusia dalam organisasi (partai politik) yang melakukan proses seleksi yang dilatih dan dipersiapkan untuk memiliki

keterampilan dan disiplin ilmu. Proses seleksi dapat disebut juga kaderisasi. Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi.

Mawasdi Rauf berpendapat bahwa kaderisasi merupakan fungsi yang terabaikan sejak awal kehidupan partai politik sampai masa pasca Orde Baru sekarang ini sehingga apabila partai politik mampu menghasilkan anggota partai yang berkualitas maka partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Proses kaderisasi pada partai politik memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan militansi, salah satu caranya yaitu dengan penanaman ideologi atau yang biasa disebut visioning. Penanaman ideologi adalah faktor kunci pengkaderan yang dalam institusi yang merupakan bagian dari format pengkaderan formal dengan tahapan-tahapan yang dimatangkan oleh institusi yang bersangkutan.

Sumber daya manusia sebagai calon anggota dalam partai politik akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, arah perjuangan partai dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh partai serta memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci yaitu dengan penanaman ideologi dan/atau dengan pendidikan politik.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah

a. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah menurut Sumarno (2005) merupakan suatu pesta demokrasi rakyat yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik serta berasal dari organisasi masyarakat yang berdiri secara independen dan memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terselenggara dengan mengajukan para calon Kepala Daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik serta dari organisasi masyarakat sehingga diharapkan para calon Kepala Daerah tersebut dapat mewakili aspirasi dari partai politik atau organisasi masyarakat tersebut. Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan merujuk pada landasan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengatur situasi sosial yang mendasarkan norma atau aturan masyarakat maupun dasar hukum tertinggi di Indonesia yang merupakan kedaulatan rakyat sebagai syarat utama dalam Pemilihan Kepala Daerah yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, Ayat 4 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Ridwan HR, 2002).

b. Pemilihan Walikota

Menurut Sunarno (2008), walikota merupakan pemerintah yang mengatur pemerintahan suatu daerah sesuai dengan amanat Pasal 18, Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan Kepala Daerah untuk jabatan walikota merupakan upaya dalam pemerintahan untuk melahirkan seorang pemimpin bagi masyarakat Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 18, Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dimana walikota tersebut diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tertentu untuk menata kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang meliputi upaya pencarian, pembacaan dan penelaahan yang bersumber dari beberapa penelitian yang terdahulu serta bahan pustaka yang bersifat real terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya (Meliansyah, 2016). Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Asep Nurjaman dengan judul penelitian “ *Cleavage Agama Di Tingkat Lokal, Indonesia: Identifikasi Partai Tanpa Komitmen Electoral tahun 2015* “ dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran Muhammadiyah dalam partai politik yakni PKB dan PAN adalah bersifat netral serta tidak memihak di antaranya keduanya karena mendasarkan pada prinsip Muhammadiyah yakni sebagai kelompok Islam yang menjunjung tinggi kebebasan warganya untuk memilih para calon bakal kepala daerah.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan penelitian ini yakni peneliti juga menganalisis peran Muhammadiyah yang mendasarkan pada khittahnya dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk posisi walikota di Kota Yogyakarta, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak meneliti tentang peran organisasi NU dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota di Kota Yogyakarta.

2. Penelitian oleh Rosyida Prihandini dengan judul penelitian yakni “ *Relasi Partai Amanat Nasional Dengan Muhammadiyah Di Dalam Struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015* “ dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran Muhammadiyah dalam partai politik PAN adalah terjadinya hubungan simbiosis mutualisme yakni PAN membutuhkan banyak suara warga Muhammadiyah untuk menarik perolehan suara dan dapat memenangkan pemilihan legislatif dan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap Muhammadiyah, sedangkan PAN memberikan bantuan dalam bentuk pemberian alokasi dana yayasan yang didirikan oleh Muhammadiyah.

Hasil penelitian berkaitan dengan penelitian ini yakni peneliti meneliti tentang peran Muhammadiyah dalam meraih suara pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta sebagaimana hal tersebut juga tercermin dalam prinsip Muhammadiyah dalam salah satu khittah yakni menjalin komunikasi dengan kalangan partai politik serta melakukan perencanaan dan pengorganisasian para kader politik untuk program Muhammadiyah jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji peran PAN sebagai organisasi politik dalam meraih suara partisipan PILKADA Walikota Yogyakarta..

3. Penelitian oleh Jusuf Harsono dengan judul penelitian yakni “ *Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015* ” dimana hasil penelitian adalah sikap politik sebagai peran dari organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA dalam pemilihan bupati Ponorogo tahun 2015 yakni tidak melakukan politik praktis atau mendukung salah satu calon secara formal dan organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai

fasilitator yang bersifat informal tentang PEMILUKADA. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga.

Penelitian ini berkaitan dengan tema peneliti yakni bagaimana peran Muhammadiyah pada PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 terkait dengan khittahnya yakni terjalannya komunikasi dengan kalangan partai politik dan lembaga pemerintah, perencanaan dan pengorganisasian para kader politik untuk program Muhammadiyah jangka menengah dan jangka panjang, persiapan kader profesional pada struktur pemerintahan pada posisi obyektif sehingga tercipta sistem pemerintahan “*good governance*”. Sedangkan perbedaan dalam dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis tentang peran Muhammadiyah dalam pemilihan bupati melainkan pemilihan walikota Yogyakarta 2017.

4. Penelitian oleh Adil Mubarak, S.IP, M.Si tahun 2012 dengan judul “*Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang*” dengan hasil penelitian yakni peran perilaku politik elit Muhammadiyah di Kota Padang Panjang lebih cenderung mengarah pada pola kooperatif akomodatif yang diperlihatkan dari pola kerjasama Muhammadiyah dan pemerintah yang cenderung sejalan, harmonis, dan nyaris tanpa intrik dan kritik terhadap kekuasaan karena para elit Muhammadiyah mampu mempengaruhi pemerintah melalui beberapa parpol yaitu faktor identitas primordial dan faktor personal.

Penelitian ini berkaitan dengan tema peneliti yakni peran Muhammadiyah melalui perilaku elitnya dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 terkait dengan khittahnya sebagai faktor identitas primordialnya yakni terjalinnya komunikasi dengan kalangan partai politik dan lembaga pemerintah sehingga dilakukan perencanaan serta pengorganisasian para kader politik untuk program Muhammadiyah dengan mempersiapkan kader profesional pada struktur pemerintahan pada posisi obyektif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis tentang perilaku elit Muhammadiyah secara khusus namun cenderung pada perannya secara umum dalam PILKADA Walikota Yogyakarta terkait dengan khittahnya.

5. Penelitian oleh David Effendi (2005) dengan judul "*Peran Ormas Berbasis Islam Sebagai Civil Society Organization Dalam Pilkada Di Bantul*" (Studi kasus pimpinan daerah muhammadiyah Kab. Bantul dan PC Nadhatul Ulama Kabupaten Bantul) dengan hasil penelitian yakni peran politik Muhammadiyah dan NU di Bantul bersifat signifikan dalam PILKADA di Bantul. Hal ini dapat dipahami mengingat warga Bantul memiliki pengaruh besar dalam meraih suara simpatisan karena sebagian besar masyarakatnya adalah partisipan Muhammadiyah dan NU sehingga organisasi Muhammadiyah dan NU memiliki peran besar dalam kebijakan- kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah Bantul.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti mengkaji tentang seberapa besar peran Muhammadiyah yang mendasarkan pada khittahnya dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 mengingat organisasi Muhammadiyah di Kota Yogyakarta juga memiliki fungsi penting di tiap aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga

membutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung keseluruhan fungsi tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis tentang PILKADA Bupati melainkan walikota Yogyakarta.

6. Penelitian oleh Jajang Kurniawan (2011), dengan judul "*Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah Dalam Pambardayaan Politik Perempuan*" dengan hasil penelitian yakni peran Muhammadiyah melalui 'Aisyiyah' sebagai organisasi otonomnya adalah melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis dimana Pimpinan Pusat 'Aisyiyah' juga turut mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, *workshop*, pengajian, kajian-kajian, penerbitan buku pendidikan politik, pelatihan dan sebagainya dimana Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusat 'Aisyiyah' melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah untuk kecapaian program-program tersebut.

Penelitian tersebut berkaitan erat dengan penelitian ini dimana peneliti juga mengkaji tentang peran Muhammadiyah berdasarkan khittahnya dalam politik pada PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 dimana tidak menutup kemungkinan terdapat peran 'Aisyiah' dalam perolehan suara PILKADA Waliokta Yogyakarta terkait dengan program khusus bagi perempuan dari kebijakan pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji tentang keterlibatan 'Aisyiah' secara khusus dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017.

7. Penelitian oleh Muhammad Ilham (2015) dengan judul "*Peran Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah 2014-2019*" dimana hasil penelitian ini adalah elit Muhammadiyah memiliki peran dalam fungsi struktur sosial sebagai agen

sosialisasi bakal calon yaitu, kiai, pengurus wilayah hingga pengurus ranting, dan simpatisan sehingga mereka memiliki fungsi yang besar demi mengembangkan kualitas masyarakat disekitarnya dalam pemilihan legislatif DPD DIY dengan tujuan untuk meraih suara yang cukup untuk dapat terpilih kembali mewakili Yogyakarta di Senayan.

Kaitan dalam penelitian ini adalah peneliti juga menganalisis tentang peran Muhammadiyah dalam keseluruhan fungsinya terkait dengan khittah yang diciptakannya pada PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji tentang peran Muhammadiyah dalam pemilihan legislatif DPD DIY.

8. Penelitian oleh MA.Sumadji (2016) dengan judul “*Sikap Politik Elit Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Di Surakarta Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung (Sebuah Studi Komparatif)*” dimana hasil penelitian ini adalah peran politik para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terbagi menjadi tiga varian yakni sikap moderat idealistik yang orientasi sikapnya menuju pada Islam ideal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sikap realistik-kritis yang melihat keterkaitan antara dimensi substantif daripada doktrin agama, dengan konteks sosial masyarakat. Sikap akomodatif-pragmatis yang meletakkan sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan. Perbedaan dan persamaan sikap para elit diidentifikasi secara komparatif sehingga jelas elit yang setuju dan tidak setuju terhadap pemilihan Presiden secara langsung.

Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian ini yakni peneliti juga menganalisis tentang peran Muhammadiyah dalam politik yakni PILKADA Walikota

Yogyakarta tahun 2017 dimana sikap moderat idealistic, realistik-kritis dan akomodatif-pragmatis adalah juga merupakan cerminan dari khittah Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak menganalisis tentang peran Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden.

9. Penelitian oleh Amaliatul Waliadin (2012) dengan judul "*Peran Elit Muhammadiyah Kota Palembang pada Pilkada Tahun 2008*" dengan hasil penelitian yakni terjadi kerancuan pada peran Muhammadiyah dalam menentukan konsep yang jelas mengenai sikap Muhammadiyah dalam memberikan kebebasan elitnya untuk terjun ke politik praktis. Walaupun Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971 sebagai acuan baku telah menjelaskan hubungan Muhammadiyah dan Politik ternyata tidak bisa juga menjadi pondasi yang kuat dalam menetralsir keberadaan posisi Muhammadiyah dalam tataran politik.

Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian ini yakni peneliti juga menganalisis tentang seberapa besar Muhammadiyah dalam menjalankan perannya dalam politik PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 terkait dengan khittah yang menjadi dasar kepribadian Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak meneliti tentang khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971 melainkan khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 2002.

10. Penelitian oleh Ridho alhamdi (2011), yang berjudul "*Dinamika islam dan Politik Elit - Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010*". Hasil penelitian ini adalah terdapat empat peran perilaku para elit Muhammadiyah dari kaum modernis yaitu sikap transformatif-idealistik, sikap moderat-idealistik, sikap realistik-kritis, dan sikap akomodatif-pragmatis. Keempat varian tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu

faktor latar belakang sosiologis masing-masing elite dan faktor pemahaman masing-masing elite terhadap organisasi Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian ini yaitu peneliti menganalisis tentang berbagai peran Muhammadiyah melalui elit politiknya dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 dimana peran tersebut juga mendasarkan pada khittah Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak meneliti tentang peran dinamika Islam pada Muhammadiyah secara khusus dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2012.

11. Penelitian oleh Aryudhi, Eky Prasetya (2018) dengan judul “ *Menguji Netralitas Politik Muhammadiyah Pada Politik Lokal* “ dengan hasil penelitian yakni berdasarkan sikap netralitas pertama, sikap secara tidak aktif mendukung salah kandidat. Kedua, tidak menjadi tim sukses salah satu calon. Ketiga, tidak memiliki kepentingan politik. Dari ketiga aspek tersebut, PDM Kota Yogyakarta tidak netral, karena tidak memenuhi indikator ketiga aspek tersebut. Ketidaknetralan PDM disini bukan berdasarkan bahwa PDM berafiliasi dengan partai politik, atau berperilaku seperti partai politik untuk memenangkan calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Akan tetapi, karena keberpihakan PDM mendukung salah satu calon di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis yakni menganalisis tentang berbagai peran Muhammadiyah melalui elit politiknya dalam PILKADA Walikota Yogyakarta tahun 2017 dimana peran tersebut juga mendasarkan pada ijtihad Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak menguji tentang netralitas politik Muhammadiyah pada politik lokal.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka menghubungkan suatu teori secara ilmiah yakni variable independen atau variable bebas dan variabel dependen atau variable terikat sehingga membentuk suatu pemikiran yang sistematis dalam memecahkan masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2009). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Gerakan Sosial Islam

Gerakan Sosial Islam merupakan gerakan yang memiliki tujuan khusus yakni memberdayakan serta menata kehidupan umat islam sebagai respon dari keterpurukan Islam sebagai akibat dari perubahan kondisi sosial dan politik di dunia yang menimbulkan perubahan tatanan kehidupan yang kurang atau tidak berlandaskan keislaman.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi berbasis agama Islam yang terbentuk dengan latar belakang hasil pendalaman dari KH. Ahmad Dahlan tentang kandungan isi al-Quran yang memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara dengan menonjolkan kepribadian dan ijtihadnya yang salah satunya adalah melakukan strategi politik pada pemilihan walikota Yogyakarta.

3. Partai Politik

Partai politik merupakan golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tujuan, ideology dan agama dimana dalam hal ini adalah keterlibatan Muhammadiyah sebagai organisasi agama dalam golongan tersebut yang memiliki tujuan dan ideologi untuk memperjuangkan kehidupan umat manusia.

4. Pemilihan Kepala Daerah Walikota Kota Yogyakarta

Pemilihan kepala daerah walikota yang disingkat pemilukada walikota adalah pemilihan umum untuk memilih walikota secara langsung di Kota Yogyakarta berdasarkan peraturan pemerintah nomer 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu penentuan konstruk atau sifat yang akan dikaji atau dipelajari oleh peneliti sehingga menjadi suatu variable yang dapat diukur sehingga menjadi suatu definisi untuk menjelaskan cara tertentu dalam meneliti serta mengoperasikan konstruk tersebut dan mempermudah bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama (Sugiyono, 2009). Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada peran Muhammadiyah dalam ikhtiarnya terkait prinsip, ideologi, dan kepribadiannya dalam keterlibatannya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk yang berkaitan dengan politik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemilihan walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 yang dapat diukur dengan :

1. Terjalannya komunikasi dengan kalangan partai politik dan lembaga pemerintah serta berbagai kekuatan bangsa lainnya dalam memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, umat, dan bangsa.
2. Perencanaan dan pengorganisasian para kader politik untuk program Muhammadiyah jangka menengah dan jangka panjang yakni pada lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun institusi lainnya yang penting dan strategis.

3. Mempersiapkan kader professional pada struktur pemerintahan pada posisi obyektif oleh organisasi terutama melalui lembaga pendidikan dan amal usaha Muhammadiyah, lebih khusus Perguruan Tinggi
4. Terciptanya sistem pemerintahan “*good governance*” dan berbasis meritokrasi yakni presiden, wakil presiden, menteri, anggota legislatif, pejabat yudikatif, dan pejabat pemerintahan di struktur dan institusi mana pun.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Metode penelitian menuntun dan mengarahkan pelaksanaan penelitian agar hasilnya sesuai dengan realita (Silalahi, 2012; 14).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini sehingga penelitian deskriptif tidak sekedar menunjukkan distribusinya, namun juga berusaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki (Nyoman, 2012). Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi peran organisasi masyarakat Muhammadiyah yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian dalam rangka menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat (Silalahi, 2012). Penelitian ini menjelaskan serta menganalisa sejauh mana peran organisasi masyarakat

Muhammadiyah yang berbasis keagamaan dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017 terkait dengan khittah Muhammadiyah.

2. Jenis Sumber Data

Data penelitian adalah bahan penting yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis serta mencapai tujuan dalam penelitian (Silalahi, 2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana menurut Silalahi (2012) data primer adalah suatu obyek atau dokumen asli atau material mentah dari pelaku (*first hand information*). Data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dengan ketua Lembaga Hikmah Kajian Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Yogyakarta.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagaimana yang dinyatakan oleh Silalahi (2012) yakni bahan atau material yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kajian berupa artikel, jurnal dan media terkait dengan aktivitas-aktivitas organisasi masyarakat Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses dalam mendapatkan data empiris dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi;291). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa teknik wawancara dimana menurut Silalahi (2012) wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan ketua Lembaga Hikmah Kajian Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Sultan Agung Nomor 14, Wirogunan, Pakualaman Yogyakarta terkait dengan aktivitas-aktivitas organisasi masyarakat Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017. Peneliti juga menggunakan teknik penelitian berupa dokumentasi yakni cara pengumpulan data berupa bahan tertulis seperti seperti berita di media dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016:21). Peneliti menggunakan dokumentasi tentang aktivitas-aktivitas organisasi masyarakat Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017 dari berbagai media serta beberapa artikel dan jurnal.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2010: 335) adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Dalam analisis data, peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan serta menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan untuk mengetahui peran organisasi masyarakat Muhammadiyah dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta (Pelwalkot) tahun 2017. Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Sugiono (2010) adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.